

JURNAL KOMPILEK

Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

Retno Murni Sari

RENCANA ANGGARAN KEUANGAN DAERAH BASIS KONSEP PERAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (STUDI PADA PEMDA KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Sandi Eka Suprajang

ANALISIS KEPUTUSAN KONSUMEN MEMBELI INDOMIE MELALUI ATRIBUT PRODUK (STUDI PADA KONSUMEN DI KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR)

Kristya Damayanti

STRATEGI DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH BERASURANSI PADA PEMASAR ASURANSI TAHAPAN BERJANGKA PT BANK CENTRAL ASIA BLITAR

Riris Dewi Larasati/
Yudhanta
Sambharakreshna

ANALISIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) UNTUK MEMINIMALKAN KREDIT MACET PADA PNPM MANDIRI PERDESAAN (STUDI KASUS PADA UPK KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR)

Nanang Dwi Hermawan/
Siti Sunrowiyati

ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN BERDIKARI JAYA CRAFT KOTA BLITAR)

Yesti Nawangsari/
Iwan Setya Putra

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT DALAM MENURUNKAN TINGKAT KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM "KHARISMA MITRA KARYA"

Ajeng Jevia Putri/
Sulistya Dewi
Wahyuningsih

MENURUNKAN POTENSI KREDIT MACET MELALUI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DI PT. BPR NUSAMBA WLINGI-BLITAR

Tetty Widiyastuti

PENGARUH RASIO LEVERAGE DAN RASIO PROFITABILITAS TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI)

Rony Ika Setiawan

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: SEBUAH TINJAUAN ETIS DAN REGULATIF DALAM BISNIS

[Vol 8, No. 1]

Hal. 1 - 114

Juni 2016

Diterbitkan oleh:

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESUMA NEGARA BLITAR
JI. Mastrip 59 Blitar 66111, Telp./Fax : (0342) 802330/813779
Email : info@stieken.ac.id**

[STIE KESUMA NEGARA BLITAR]

JURNAL KOMPILEK

Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

**Diterbitkan pleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
STIE Kesuma Negara Blitar sebagai terbitan yang menyajikan informasi dan
analisa persoalan ilmu ekonomi, manajemen, maupun akuntansi.**

Pelindung

Iwan Setya Putra, SE., Ak., MM.

Pemimpin Redaksi

Aris Sunandes, SE., MM.

Sekretaris Redaksi

Vera Noviana, SE., Ak.

Pelaksana Redaksi

Siti Sunrowiyati, SE., MM.

Sandi Eka Suprajang, SE., MM.

Penyunting

Tanto Askriyandoko Putro, SE., MM.

Reviewers:

Prof. Dr. HM. Pudjihardjo, SE, MS – Universitas Brawijaya

Iwan Setya Putra, SE., Ak., MM – STIE Kesuma Negara

Yudhanta Sambharakreshna SE., MSi., Ak – Universitas Trunojoyo

Alamat Redaksi:

Kampus STIE Kesuma Negara

Jl. Mastrip No. 59, Blitar, Jawa Timur – 66111

Telepon/Fax:

(0342) 802330 / (0342) 813788

on-line:

<http://www.stieken.ac.id>

E-mail:

info@stieken.ac.id

JURNAL KOMPILEK

Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

Daftar Isi :

<i>Retno Murni Sari</i>	RENCANA ANGGARAN KEUANGAN DAERAH BASIS KONSEP PERAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (STUDI PADA PEMDA KABUPATEN TULUNGAGUNG) (Hal. 1-7)
<i>Sandi Eka Suprajang</i>	ANALISIS KEPUTUSAN KONSUMEN MEMBELI INDOMIE MELALUI ATRIBUT PRODUK (STUDI PADA KONSUMEN DI KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR) (Hal. 8-20)
<i>Kristya Damayanti</i>	STRATEGI DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH BERASURANSI PADA PEMASAR ASURANSI TAHAPAN BERJANGKA PT BANK CENTRAL ASIA BLITAR (Hal. 21-34)
<i>Riris Dewi Larasati/ Yudhanta Sambharakreshna</i>	ANALISIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) UNTUK MEMINIMALKAN KREDIT MACET PADA PNPM MANDIRI PERDESAAN (STUDI KASUS PADA UPK KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR) (Hal. 35-49)
<i>Nanang Dwi Hermawan/ Siti Sunrowiyati</i>	ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN BERDIKARI JAYA CRAFT KOTA BLITAR) (Hal. 50-66)
<i>Yesti Nawangsari/ Iwan Setya Putra</i>	ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT DALAM MENURUNKAN TINGKAT KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM "KHARISMA MITRA KARYA" (Hal. 67-80)
<i>Ajeng Jevia Putri/ Sulistyia Dewi Wahyuningsih</i>	MENURUNKAN POTENSI KREDIT MACET MELALUI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DI PT. BPR NUSAMBA WLINGI-BLITAR (Hal. 81-91)
<i>Tetty Widiyastuti</i>	PENGARUH RASIO LEVERAGE DAN RASIO PROFITABILITAS TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI) (Hal. 92-100)
<i>Rony Ika Setiawan</i>	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: SEBUAH TINJAUAN ETIS DAN REGULATIF DALAM BISNIS (Hal. 101-114)

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR KELOMPOK SIMPAN PINJAM
PEREMPUAN (SPP) UNTUK MEMINIMALKAN KREDIT MACET PADA PNPM MANDIRI
PERDESAAN (STUDI KASUS PADA UPK KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN
BLITAR)**

**Riris Dewi Larasati
Yudhanta Sambharakreshna**

STIE Kesuma Negara Blitar

Abstrak: Pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang berada di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Dengan adanya pemberian pinjaman seperti ini pihak UPK juga mengharapkan pengembalian pinjaman yang telah diberikan tersebut dengan bunga dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Karena bagi UPK, pinjaman merupakan sumber utama penghasilan sekaligus sumber perputaran dana perguliran. Namun dalam prakteknya tidaklah semuanya dapat berjalan dengan lancar, hal ini terlihat dari persentase Non Performing Loan (NPL) pada UPK Kecamatan Binangun pada tahun 2012 sebesar 19%, pada tahun 2013 sebesar 54%, dan pada tahun 2014 sebesar 87%. Upaya penyelamatan kredit macet yang dilakukan UPK Kec. Binangun Kabupaten Blitar meliputi penjadwalan kembali (rescheduling), penataan kembali (restructuring), persyaratan kembali (reconditioning), melakukan kompensasi/penyitaan jaminan, pemberian sanksi moral.

Kata kunci: pengelolaan dana bergulir, kelompok simpan pinjam perempuan (SPP), kredit macet

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang sangat inti saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu perhatian bagipemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan dan pengangguran sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah yang nyata di belahan dunia, khususnya bagi Indonesia yang merupakan Negara berkembang. Kemiskinan sudah membuat ribuan anak bangsa Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan, sulitnya dalam membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi serta masalah lain yang berarah ke tindakan kekerasan dan kejahatan.

Melalui Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ditentukan kembali alur upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan kelompok masyarakat, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan adanya proses

pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, diharapkan dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) mengucurkan dana untuk usaha keluarga melalui kelompok yang berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dana tersebut akan diberikan dalam bentuk bantuan kredit. SPP juga diperuntukkan pada kelompok perempuan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang produktif dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi dan kapasitas yang dimiliki, seperti kegiatan industri rumah tangga (*home industri*), perdagangan dan jasa.

Pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang berada di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan. Dengan adanya pemberian pinjaman seperti ini pihak UPK juga mengharapkan pengembalian pinjaman yang telah diberikan tersebut

dengan bunga dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Karena bagi UPK, pinjaman merupakan sumber utama penghasilan sekaligus sumber perputaran dana pergeliran. Namun dalam praktiknya tidaklah semuanya dapat berjalan dengan lancar, sebab banyak pinjaman yang terjadi kemacetan. Kemacetan yang timbul tersebut diperlukan penanganan yang segera oleh pihak UPK agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet yang jika presentasenya terus meningkatkan

dapat mempengaruhi tingkat kesehatan UPK.

Pada pengamatan di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Binangun, terdapat beberapa permasalahan seiring dengan berjalannya kegiatan pemberian pinjaman kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dalam perkembangannya terdapat tunggakan yang sangat signifikan. Berikut data aset beserta tunggakan SPP selama tahun 2012-2014.

Tabel 1.
Data Jumlah Aset dan Tunggakan Tahun 2012-2014

No.	Tahun	Aset SPP	Pinjaman Macet/Menunggak	Prosentase Pinjaman Macet
1.	2012	2.744.388.700	428.786.800	16%
2.	2013	2.981.035.600	1.070.356.200	36%
3.	2014	3.013.653.500	1.350.913.100	45%

Sumber: UPK Kecamatan Binangun

Kemacetan tersebut dikarenakan anggota kelompok dan ketua kelompok yang tidak bertanggungjawab sebagaimana mestinya, menggunakan uang setoran tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga hal ini sangat berpengaruh besar terhadap banyaknya tunggakan atau kredit macet. Hal tersebut mengakibatkan UPK kesulitan untuk menggulirkan dana pada kelompok lain yang ingin mendapatkan dana bantuan tersebut.

Berlandaskan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara meminimalkan kredit macet pada kelompok SPP di Kecamatan Binangun? Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisa cara meminimalkan kredit macet pada kelompok SPP di Kecamatan Binangun.

Kegunaan Penelitian

Diharapkan pada akhirnya penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan menambah wawasan serta belajar menganalisis

suatu masalah sampai pada pengambilan keputusan dan kesimpulan

2. Bagi Perusahaan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh masukan yang positif dan membangun yang dapat diterapkan perusahaan dalam pengendalian pinjaman.
3. Bagi pihak lain, pihak-pihak yang turut membaca skripsi ini agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan topic penulis dan sebagai sumbangan pemikiran tentang pengetahuan dibidang ekonomi.

LANDASAN TEORI

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Normalia Pratiwi 2013, "Analisis Manajemen Kredit Pemilikan Rumah Terhadap Penurunan Terjadinya Kredit Bermasalah". Dari analisis penyebab terjadinya manajemen kredit pemilikan rumah dalam penurunan terjadinya kredit bermasalah adalah pihak debitur yang tidak mempunyai I'tikad baik dalam melunasi hutangnya. Dengan 4 langkah tersebut Bank Tabungan

- Negara dapat menurunkan kredit bermasalah pada tahun 2007-2009.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Pramaswati, 2013 "Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengatasi Kredit Macet Perusahaan". Dari keseluruhan perhitungan dalam rasio Likuiditas, nilai rasio tertinggi di Indomobil Finance terjadi pada tahun 2011. Dimana rasio lancar sebesar 137%, rasio cepat sebesar 92%, rasio kas sebesar 30%, dan *working capital to total assets ratio* sebesar 16%. Dari keseluruhan perhitungan dalam rasio Solvabilitas, nilai rasio tertinggi di Indomobil Finance untuk tiga rasio tejadi pada tahun 2010. Dimana *total debt to total assets* sebesar 80%, *total debt to equity ratio* sebesar 397% dan *long term debt to equity ratio* sebesar 134%. Namun, untuk *time interest earned ratio* nilai tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 198%. Dari keseluruhan perhitungan dalam rasio Profitabilitas, nilai rasio tertinggi di Indomobil Finance untuk dua rasio terjadi pada tahun 2011. Dimana *net profitmargin* sebesar 151% dan *return on investment* sebesar 4,2%. Namun, untuk *return on equity* nilai rasio tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 15%. Dari keseluruhan perhitungan dalam rasio Aktivitas, nilai rasio tertinggi di Indomobil Finance untuk tiga rasio terjadi pada tahun 2010. Dimana nilai *total assets turn over ratio* sebesar 3,1%, nilai *working capital turn over ratio* sebesar 86%, nilai *inventory turn over ratio* sebesar 16%. Namun, untuk nilai *receivable turn over ratio* tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 47%. Dalam menangani kasus kredit macet dalam perusahaan tidaklah hanya dilihat dari satu sisi saja. Menganalisis laporan keuangan dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dalam mengambil keputusan selanjutnya agar selektif dalam memberi kredit selanjutnya serta fokus memperbaiki kinerja keuangan yang ditimbulkan akibat kredit macet agar menjadi lebih baik.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ashuri, 2013 "Strategi

Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh". Untuk melakukan pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaannya BMT AMAL MULIA Suruh melakukan 3 tindakan atau prosedur pokok, yaitu denganmelakukan analisis atau penilaian terhadap permohonan pembiayaan, analisis penilaian pembiayaan yaitu menggunakan 3 prinsip *character* (sifat), *Capacity* (kemampuan), dan *Collateral*(jaminan), serta yang terakhir dengan pemantauan penggunaan pembiayaan. Namun tidak semua strategi tersebut dapat berjalan dengan baik karena kurang mampunya pihak BMT dalam meramalkan masa yang akan datang serta kurang teliti dalam menganalisa permohonan pembiayaan dan persyaratan yang diajukan oleh nasabah. Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, BMT AMAL MULIA Suruh melakukan 6 prosedur yang dijalankan atau digunakan yaitu dengan pemberitahuan via telepone, pemberian surat penagihan I, Penagihan secara langsung oleh pengelola, penagihan langsung oleh manajemen, penyitaan jaminan, serta eksukusi jaminan. Namun pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang terjadi dalam setiap prosedur yang dijalani. Kekurangan pengawasan terhadap nasabah serta ketidak mampuan pihak BMT dalam melakukan pengawasan terhadap prosedur penanganan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan aturan yang ada.

Pengertian Pengololaan

Menurut Lembaga Administrasi Negara yang dikutip Tjokroamidjoyo dalam Suzana (2010:13) pengelolaan adalah "Konsep manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan meliputi fungsi organik dari manajemen yang terdiri dari perencanaan, implementasi, dan pengawasan yang mana fungsi manajemen tersebut merupakan fungsi pengelolaan yang diarahkan untuk mencapai tujuan".

Manullang (2006:5) Pengelolaan yaitu suatu seni serta ilmu merencanakan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan mengawasi sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan.

Pengertian Dana

Pengertian dana menurut Ardiyos dalam Eka Purwati (2013:17) mengemukakan bahwa "Dana mempunyai arti uang, surat berharga, serta harta lainnya yang sengaja disimpan untuk suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Dana merupakan alat yang sangat penting yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

Pengertian Dana Bergulir

Menurut Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan (2008:1), Dana bergulir adalah semua dana yang ada di program dan sifatnya adalah pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat sekitar Kecamatan yang disalirkannya melalui kelompok-kelompok masyarakat.

Tujuan Dana Bergulir

Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-Mandiri Perdesaan bertujuan:

1. Memberikan kemudahan untuk mengakses permodalan usaha kelompok masyarakat baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usahanya
2. Pengembangan dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang sesuai dengan tujuan awal program
3. Pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah perdesaan harus lebih ditingkatkan kapasitasnya.
4. Kelembagaan UPK dan lembaga pendukung lainnya harus disiapkan agar sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan.
5. Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat

Pengertian Kredit

Dalam UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit merupakan menyediakan uang atau tagihan yang dapat disamakan, didasarkan pada sebuah persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan adanya bunga.

Batubara dan Thomas Ismail, (2013:93) Kredit merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.

Hubungan Antara Pengelolaan Dana Bergulir dengan Kredit Macet

Dengan adanya pengelolaan Dana Bergulir yang optimal pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maka dapat menekan angka kredit macet. Jika Kondisi UPK berada dalam kondisi yang baik maka kegiatan Simpan Pinjam ini dipastikan akan berlangsung lancar. Namun jika kondisi keuangan dalam kondisi kurang bagus maka kegiatan perusahaan akan megalami penurunan, oleh karena itu analisis pengelolaan dana sangat diperlukan untuk mengatasi kredit macet yang terjadi di perusahaan.

Dalam pemberian kredit, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) harus yakin akan kesanggupan peminjam untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga yang telah ditentukan. Karena Pengelolaan dana bergulir disini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam, memudahkan akses pendanaan usaha skala makro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dalam pengurangan Rumah Tangga Miskin (RTM).

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang digunakan peneliti untuk membantu menjawab permasalahan yang dikemukakan. Variabel-variabel tersebut memerlukan penjelasan untuk menghindari perbedaan

pengertian dan penafsiran yang diberikan oleh pembaca. Adapun variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Pengelolaan Dana Bergulir** merupakan seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat.
2. **Kredit Macet** merupakan kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak bisa memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit.

Populasi Penelitian dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan seluruh anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP). Agar pengumpulan data dalam penelitian ini lebih terarah dan jelas maka ditentukan sampel penelitian berupa:

1. Data Laporan Keuangan SPP UPK Kecamatan Binangun Per Desember 2012
2. Data Laporan Keuangan SPP UPK Kecamatan Binangun Per Desember 2013
3. Data Laporan Keuangan SPP UPK Kecamatan Binangun Per Desember 2014

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif kuantitatif. Dimana penelitian ini menggunakan data-data seperti laporan keuangan dan database yang digunakan di UPK. Kemudian dari data-data tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembahasan perkreditan. Disamping itu penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian ini mendeskripsikan nilai-nilai yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemacetan kredit tersebut.

Metode Pengumpulan Data

1. Survei Primer

Proses dimana pengambilan data secara langsung datang ke lapangan dengan melakukan observasi untuk

mendapatkan fakta atau kondisi yang terpercaya di wilayah penelitian. Survei data primer tersebut dilakukan dengan :

1. **Observasi**
Yaitu mengamati secara langsung pada obyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Penulis mengamati secara langsung atas pelaksanaan pemberian kredit di UPK Kecamatan Binangun untuk mendapatkan informasi nyata tentang proses pemberian kredit yang dilakukan oleh UPK.
2. **Wawancara**
Yaitu mengumpulkan data/informasi dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan yang berhubungan dengan tempat yang akan diteliti guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi diperusahaan.
3. **Dokumentasi**
Yaitu metode mengumpulkan data/informasi dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki Perusahaan. Yaitu mengumpulkan data dengan jalan melakukan pencatatan dari buku-buku dan data lainnya yang dimiliki UPK Kecamatan Binangun.
2. **Survei Sekunder**
Survei sekunder adalah metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi dari instansi terkait. Pengumpulan data dari survei sekunder juga dapat bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis..

Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:

1. Analisa Prosedur Perguliran Dana Kelompok SPP di Kecamatan Binangun Analisis deskripsi terkait dengan prosedur pemberian dana bergulir kepada Kelompok SPP Kecamatan Binangun. Dalam analisis ini mendeskripsikan tentang syarat-

- syarat dan tahapan dalam pengajuan pinjaman dana bergulir di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Binangun.
2. Analisa Mekanisme Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok SPP
Analisis deskripsi terkait mekanisme program Perguliran Dana Kelompok SPP Kecamatan Binangun. Analisis ini mendeskripsikan langkah - langkah dalam program Perguliran Dana mulai dari langkah pengajuan proposal hingga pencairan dana.
 3. Analisa Kualitas Kredit Terdapat di Kecamatan Binangun
Perhitungan kualitas kredit yang terjadi pada program Perguliran Dana di Kecamatan Binangun. Jumlah ini didapat dari perhitungan jumlah rekapit kredit per 31 Desember setiap tahun.
 4. Analisa Kolektibilitas Kredit Bermasalah
Analisis kolektibilitas kredit bermasalah adalah analisis kuantitatif yang didapatkan dari perhitungan jumlah kredit yang bermasalah. Nilai dari kredit bermasalah adalah jumlah dari kredit kurangl ancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Nilai rasio dari kredit bermasalah dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

NPL atau *Non Performing Loan* adalah rasio dari jumlah kredit bermasalah. Rasio ini didapatkan dari persentase jumlah kredit bermasalah dibagi dengan total jumlah kredit.

5. Analisa Upaya Meminimalkan Kredit Macet Di Kecamatan Binangun
Analisis upaya merupakan analisis deskriptif yang menjelaskan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir jumlah kredit bermasalah yang ada dalam program Perguliran Dana Kelompok SPP Kecamatan Binangun yang berada di bawah naungan PNPM Mandiri Perdesaan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian yang berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi kasus Pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar) dilakukan selama 3 bulan itu bulan September sampai Desember 2015. Dan Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang beralamatkan di Jalan Diponegoro No. 47 Binangun Kabupaten Blitar.

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Data Perusahaan

1. Gambaran Kecamatan Binangun
Kecamatan Binangun merupakan satu dari dua puluh dua kecamatan yang membagi habis wilayah administrasi Kabupaten Blitar. Berada di wilayah Kabupaten Blitar di sebelah Selatan. Berada di sebelah selatan sungai Brantas yang membelah Kabupaten Blitar menjadi dua bagian. Yaitu Bagian selatan cenderung mempunyai struktur tanah yang kurang subur dari bagian utara. Perbatasan pada Kecamatan Binangun adalah sebagai berikut:

Barat	:	Kecamatan Panggungrejo
Utara	:	Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selopuro
Timur	:	Kabupaten Malang
Selatan	:	Kecamatan Wates

Kecamatan Binangun dengan luas wilayah 59,66 km² dibagi menjadi 12 desa. Desa Sumberkembar merupakan desa yang terluas dengan luas 17,22 km² atau 22,4% dari total luas kecamatan Binangun. Desa dengan wilayah terkecil adalah Desa Umbuldamar dengan luas wilayah 1,74 km² atau hanya 2,27% dari luas wilayah Kecamatan Binangun. Kecamatan Binangun terbagi dalam 12 desa, 33 dusun, 85 RW, 333 RT. Penduduk yang menempati wilayah administrasi Kecamatan pada tahun 2014 ini tercatat sebanyak 42.733 jiwa dengan kepadatan penduduk 556 jiwa setiap kilometer persegi.

Mata pencaharian utama masyarakat ini Kecamatan Binangun adalah petani, dengan produk pertanian

- terutama buah-buahan seperti, mangga, apokat, salak, jambu air, durian, rambutan, jeruk, papaya, melinjo, belimbing.
2. PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar
- PNPM di Kecamatan Binangun ini dimulai sejak PPK tahun 2003 dan sampai sekarang Kecamatan Binangun masih memperolehdana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dana ini dikelola dengan caraindividu oleh masyarakat melalui UPK Kecamatan Binangun. Umumnya, dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan dapat digunakan masyarakat untukmenyokong kegiatan di bidang peningkatan kapasitas, pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana perdesaan, aktivitas pendidikan dan kesehatan, serta aktivitas ekonomi melalui perguliran dana.
3. PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar
- PNPM di Kecamatan Binangun ini dimulai sejak PPK tahun 2003 dan sampai sekarang Kecamatan Binangun masih memperolehdana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dana ini dikelola dengan caraindividu oleh masyarakat melalui UPK Kecamatan Binangun. Umumnya, dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan dapat digunakan masyarakat untuk menyokong kegiatan di bidang peningkatan kapasitas, pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana perdesaan, aktivitas pendidikan dan kesehatan, serta aktivitas ekonomi melalui perguliran dana.
4. Visi dan Misi Kelembagaan
- Adapun Visi dan Misi di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Binangun adalah sebagai berikut:
- Visi** :Menciptakan tumbuhnya Perekonomian Masyarakat Kecamatan Binangun yang mandiri di dukung dengan tersedianya Sarana Prasarana Sosial Ekonomi sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Misi** :Membantu Masyarakat dengan menyediakan modal usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Binangun, Mendorong Masyarakat untuk berinisiatif, Pemberdayaan dan

Pembelajaran Masyarakat Kecamatan Binangun untuk berusaha peningkatan pendapatan dengan pelatihan Wirausaha, dst.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting terutama dalam hal pembagian tugas dan wewenang pekerjaan guna kelancaran dan keberhasilan dalam menjalankan kelembagaan, jadi pimpinan kelembagaan dan masing-masing karyawan harus mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sepuhunya atas pekerjaan tersebut.

Struktur organisasi harus fleksibel terhadap perubahan dan perkembangan dilingkungannya.Maka kelembagaan atau lembaga pada umumnya beranggapan bahwa struktur organisasi ini sangat perlu. Struktur organisasi dapat didefinisikanuntuk alat ukur kontrol yang diharapkan mampu membawa persatuan dan dinamika suatu kelembagaan, atau dapat dikatakan bahwa struktur organisasi ilmiah yang mempersatukan fungsi-fungsi yang ada dalam lingkungan tersebut. Adapun pembagian tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi kelembagaanPNPM Mandiri Perdesaan untuk Perguliran Dana Kelompok SPP di Kecamatan Binangun adalah sebagai berikut :

1. BKAD (Badan Kerja sama Antar Desa)
BKAD bertugas untuk menjalankan tugas pokok sebagai ketua lembaga pengelola partisipasi masyarakat, aktivitasyang ada pada setiap desa, aset produktif di Kecamatan, dan programnyayang sedang direncanakan oleh pihak ketiga. Kaitannya dengan UPK yaitu fungsi BKAD adalah menjadi perumus, pembahas, dan menetapkan rencana strategis untuk mengembangkan UPK dalam bidang Keuangannya dan pelayanan usaha kelompok.BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK.
2. UPK (Unit Pengelola Kegiatan)
 - a. Melakukan pelatihan untuk kelompok peminjam

- b. Melakukan sosialisasi dan penegakan aturan PNPM Mandiri Perdesaan dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan PNPM Mandiri Perdesaan bersama pelaku lainnya
 - c. Menggerjakan administrasi dan laporan pada setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan aturan program
 - d. Merencanakan anggaran dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD
 - e. Mempertanggungjawabkan keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan
 - f. Mengevaluasi dan memeriksa secara langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang telah dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan aturan yang tertulis
 - g. Melakukan bimtek/pelatihan dan memeriksa langsung administrasi dan laporan pelaku desa
 - h. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelola pinjamana, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat
 - i. Mendorong transparansi dalam mengelola keuangan, mengelola pinjaman, mengecek perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan
 - j. Memfasilitasi bersama pelaku lain untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan
3. BP - UPK (Badan Pengawas UPK)
- a. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan
- pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK
 - b. Melakukan pengawasan kepada UPK pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan
 - c. Melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan MAD, termasuk aturan perguliran
 - d. Memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus UPK
 - e. Memantau realisasi anggarandan rencana kerja yang ada di UPK
 - f. Memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim yang dibentuk pada saat MAD
 - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada MAD/BKAD
4. Tim Verifikasi SPP
- a. Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing-masing desa
 - b. Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta dilapangan
 - c. Memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, serta bersama dengan BKAD memeriksa keterkaitan usulan antar desa sebagai suatu konsep pengembangan wilayah
 - d. Menyampaikan usulan kegiatan kepada fasilitator Kabupaten agar dilakukan pemeriksaan kembali
 - e. Membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada peserta MAD.
5. Kelompok SPP
- Kelompok SPP adalah kelompok penerima bantuan perguliran dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Kelompok ini beranggotakan para perempuan dengan kemampuan usaha yang memiliki potensi berkembang.
6. Tim Penyehatan Pinjaman
- Tim Penyehatan Pinjaman terbentuk supaya bisa mendorong dalam melestarikan dan mengembangkan dana bergulir melalui penyehatan pinjaman bermasalah. Tim ini terbentuk sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penyehatan pinjaman melalui pola-

pola penyelesaian yang sesuai dengan kondisi pinjaman bermasalah dan permasalahan yang terjadi dikelompok. Tim ini dibentuk oleh BKAD atau MAD.

Analisis Data

1. Prosedur Perguliran Dana Kelompok Spp di Kecamatan Binangun SPP merupakan kegiatan pemberian pinjaman usaha untuk kelompok perempuan yang telah memiliki kegiatan simpan pinjam. Ketentuan proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun dengan ketentuannya sebagai berikut:
 - a. Pemanfaat adalah warga masyarakat Kecamatan Binangun
 - b. Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP.
 - c. Pemanfaat terikat dalam satu kelompok tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
 - d. Pengajuan pinjaman dituliskan dalam bentuk kelengkapan proposal dan diserahkan kepada UPK mengetahui Kepala Desa.
 - e. Pinjaman digunakan untuk kegiatan usaha produktif.
 - f. Jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 12 bulan.
 - g. Jadwal angsuran (pokok dan jasa) disesuaikan dengan fungsi kelompok (kelompok penyalur) dan siklus usahanya.
 - h. Kelompok memiliki usaha minimal berumur 1 tahun mempunyai kepengurusan jelas, administrasi ada, mempunyai anggota, anggota mempunyai usaha dan kegiatan rutin dalam kelompok.
 - i. Yang bisa mengajukan dana perguliran adalah bukan kelompok bermasalah/masih memiliki tunggakan.
 - j. Anggota kelompok minimal beranggotakan 5 - 20 orang yang terdiri dari 3 pengurus dan anggota.
 - k. Batas pengajuan tiap orang bagi kelompok (kelompok baru)
 2. Ketentuan kelompok SPP maksimal tiap orang Rp. 3.000.000,-.
 3. Bagi kelompok dan anggota yang lancar selama lima tahun berturut-turut bisa mengajukan pinjaman maksimal tiap orang Rp. 15.000.000,- (bagi anggota kelompok baru diatur dalam point j dan k) dengan ketentuan yang akan ditetapkan kemudian.
 4. Para anggota kelompok peminjam sanggup memberikan agunan dengan nilai sesuai besar pinjaman dan agunan tetap berada di masing-masing anggota. Bila terjadi tunggakan akan diambil oleh ketua kelompok untuk diuangkan.
 5. Memiliki kesepakatan tertulis untuk melaksanakan tanggungrenteng dan semua anggota bersedia dan melaksanakan sistem tanggung renteng antar anggota dalam satu kelompok.
 6. Kelompok SPP yang berhak mengajukan usulan adalah kelompok yang sebelumnya telah menerima pinjaman dan kelompok yang belum pernah menerima pinjaman dari UPK.
 7. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan pengajuan kelompok.
 8. Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam, Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaatan RTM.
 9. Jenis kelompok SPP yang berhak mengajukan usulan adalah Kelompok Simpan Pinjam
- Ketentuan kelompok SPP adalah:
- a. Kelompok pemanfaat terdiri dari kelompok perempuan
 - b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
 - c. Kegiatan pinjaman kepada kelompok masih berlangsung dengan baik.
 - d. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

Tahapan dalam Perguliran Dana UPK di Kecamatan Binangun terdiri dari tiga tahapan utama. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

a. Tahap Pengajuan Pinjaman

Kelompok SPP yang sebelumnya telah terbentuk dengan pendampingan petugas UPK yaitu Pendamping Kelompok, mengajukan proposal pinjaman yang selanjutnya diserahkan kepada petugas UPK di Kantor Kecamatan Binangun. Dalam proposal Kelompok SPP mencantumkan beberapa hal, antara lain:

- 1) Berita acara pembentukan kelompok
- 2) Profil kelompok SPP
- 3) Surat pernyataan pengajuan pinjaman dan kesediaan tanggung renteng
- 4) Fotocopy KTP setiap kelompok
- 5) Blangko pengajuan pinjaman anggota
- 6) Berita acara pengajuan
- 7) Surat ijin suami

b. Tahap Pemeriksaan Pinjaman/Verifikasi Pinjaman

Pada tahap pemeriksaan Tim Verifikasi Perguliran Dana menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran proposal yang diterima dari kelompok SPP, kemudian Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan masing-masing anggota dan membuat analisis atas permohonan pinjaman tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, UPK dan BKAD membuat keputusan apakah pinjaman tersebut disetujui atau ditolak didalam Musyawarah Pendanaan SPP.

c. Tahap Realisasi/Pencairan Pinjaman

Setelah menerima berkas pinjaman yang telah diputuskan, UPK memberitahu Kelompok

tentang putusan tersebut. Jika ditolak, Kelompok SPP diberitahu disertai alasan penolakannya. Jika disetujui, Kelompok SPP diberitahu mengenai ketentuan perjanjian pinjaman dan angsurannya. Jika Kelompok SPP telah memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman dan angsuran tersebut, maka UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman. Setelah Kelompok SPP beserta anggotanya memahami semua ketentuan pinjaman yang akan diterimanya, Kelompok dan anggotanya diminta menandatangani dokumen Surat Perjanjian Pinjaman dan Bukti Kas Keluar UPK, yang akhirnya uang pinjaman diserahkan kepada masing-masing anggota. Pada saat menerima uang itu, juga merupakan tanggal jatuh tempo melakukan angsuran pinjaman.

2. Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok SPP

Alur perguliran dana kelompok SPP Kecamatan Binangun dimulai dari proposal perencanaan pinjaman dari kelompok SPP masuk dalam Musyawarah Desa I (MD I), Musyawarah Desa ini merupakan Musyawarah Desa Khusus Perempuan. Pada MD I tim dari PNPM-MP Tim Verifikasi, yang bertugas untuk memverifikasi Usulan Proposal yang diajukan dan menyimpulkan layak tidaknya kelompok perempuan tersebut mendapatkan pinjaman di UPK. Selanjutnya Tim Pengelola kegiatan dan Tim Verifikasi melakukan suatu penyelesaian tahap akhir dan membuat Rekomendasi terhadap kelompok-kelompok pengajuan proposal peminjaman dan setelah itu akan mengadakan (MAD II). Dalam MAD II ini dilakukan perangkingan terhadap setiap kelompok SPP. Kelompok dengan rangking tertinggi berhak mendapatkan giliran pertama untuk mendapatkan dana pinjaman. Pada MAD III yaitu MAD Penetapan Usulan, Tim Kecamatan menetapkan rangking untuk kelompok-kelompok SPP. Kelompok rangking pertama

mendapatkan penyaluran dana yang pertama/duluan sesuai dengan dana yang telah terdapat di buku Kas maupun Buku Bank SPP dan UEP yang ada di UPK. Kelompok-kelompok yang dibelakang diharapkan menunggu sampai giliran yang telah ditetapkan di MAD Penetapan Usulan. Kelompok yang telah mendapatkan dana pinjaman menggunakan dan mengangsur pinjamannya secara teratur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama dalam aturan dana bergulir. Angsuran dari kelompok peminjam pertama dimasukan ke dalam Kas maupun Buku Bank SPP yang ada di UPK. Dana angsuran tersebut diatas selanjutnya akan digulirkan atau digunakan sebagai dana pinjaman untuk kelompok selanjutnya.

3. Analisis Jumlah Kredit Macet yang Terdapat di Kecamatan Binangun
- Total kredit yang disalurkan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 2.500.343.800,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp 2.109.562.300,- serta pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.555.330.100,-. Pada perhitungan rekapan laporan keuangan yang disajikan dalam tabel 4.1 diketahui bahwa kualitas pinjaman dana dari tahun 2012 ke tahun 2014 mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah total kredit pertahun yang menurun, jumlah kredit lancar yang menurun dan jumlah kredit macet yang meningkat.

Berdasarkan hasil perhitungan kenaikan/penurunan kualitas kredit dari tahun 2012 ke tahun 2013 diketahui bahwa pada kredit lancar mengalami penurunan kualitas yang sangat signifikan dengan nilai penurunan kredit sebanyak Rp 1.071.857.100,-, kredit dengan perhatian khusus mengalami kenaikan kualitas, kredit kurang lancar mengalami penurunan, kredit diragukan mengalami kenaikan, dan kredit mengalami kenaikan yang cukup signifikan pula, yaitu sebesar Rp 641.569.400,-. Dengan kondisi penurunan kualitas lancar dan kenaikan kredit macet yang cukup

signifikan dapat diartikan bahwa selama periode perguliran/penyaluran dana pada 2013 mengalami kondisi yang buruk.

Berdasarkan hasil perhitungan kenaikan/penurunan kualitas kredit dari tahun 2013 ke tahun 2014 diketahui bahwa pada kredit lancar mengalami penurunan kualitas yang sangat signifikan dengan nilai penurunan kredit sebanyak Rp 737.452.000,-, kredit dengan perhatian khusus mengalami penurunan kualitas, kredit kurang lancar mengalami penurunan, kredit diragukan mengalami stabil, dan kredit mengalami kenaikan yang cukup signifikan pula, yaitu sebesar Rp 280.556.900,-. Dengan kondisi penurunan kualitas lancar dan kenaikan kredit macet yang cukup signifikan dapat diartikan bahwa selama periode perguliran/penyaluran dana pada 2014 mengalami kondisi yang buruk.

Pada diagram di atas dapat dilihat penurunan yang sangatlah tinggi dari tahun 2012 ke tahun 2013 dan tahun 2013 ke tahun 2014. Kondisi yang tidak bagus juga dapat dilihat dari kenaikan kredit macet yang terdiagram. Kredit macet mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2012 ke tahun 2013 dan tahun 2013 ke tahun 2014.

4. Analisa Kolektibilitas Kredit Bermasalah
- Hasil perhitungan NPL pada tahun 2012 jumlah kredit bermasalahnya adalah 19%, pada tahun 2013 jumlah kredit bermasalahnya adalah 54%, dan tahun 2014 jumlah kredit bermasalahnya menjadi 87%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa nilai rasio NPL pada program Perguliran Dana Kelompok SPP Kecamatan Binangun sangatlah tinggi, lebih dari ambang batas rasio NPL yang ditetapkan BI yaitu sebesar 5%. Dengan nilai rasio yang sangat tinggi dapat diartikan bahwa program Perguliran Dana Kelompok SPP Kecamatan Binangun sudah tidak sehat. Hal ini karena banyaknya

- angka kredit bermasalah dan dana tidak bergulir secara normal.
5. Upaya Meminimalkan Kredit macet di Kecamatan Binangun
- Kondisi perguliran dana yang ada di Kecamatan Binangun saat ini sudah tidak sehat karena lebih dari 50% dana yang ada tidak bergulir secara normal, atau mengalami kemacetan di salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih dari 1 milyar dana bantuan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, terdapat beberapa upaya untuk meminimalkan kerugian yang dirasa untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah:
- Mengadakan *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)
 - Memperpanjang jangka waktu kredit
 - Memperpanjang jangka waktu angsuran
 - Mengadakan *Restructuring* (Penataan Kembali)
 - Mengadakan *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)
 - Melakukan Kompensasi/Penitiaan Jaminan
 - Memberikan Sanksi Moral

Pembahasan

Hasil penelitian membuktikan bahwa anggota kelompok minimal beranggotakan 5 – 20 orang yang terdiri dari 3 pengurus dan anggota. Batas pengajuan tiap orang bagi kelompok (kelompok baru) maksimal tiap orang Rp. 3.000.000,-. Bagi kelompok dan anggota yang lancar selama lima tahun berturut-turut bisa mengajukan pinjaman maksimal tiap orang Rp. 15.000.000,-. Yang bisa mengajukan pinjaman dari dana perguliran harus minimal adalah kategori Kelompok yang Sudah Berkembang. Jika mempunyai catatan tunggakan dapat mengajukan pinjaman, namun pencairannya menunggu sampai pinjaman sebelumnya dilunasi.

Berdasarkan hasil perhitungan kenaikan/penurunan kualitas kredit dari tahun 2012 ke tahun 2013 diketahui bahwa pada kredit lancar mengalami

penurunan kualitas yang sangat signifikan dengan nilai penurunan kredit sebanyak RP 1.071.857.100,-, kredit dengan perhatian khusus mengalami kenaikan kualitas sebesar Rp 35.830.800,-, kredit kurang lancar mengalami penurunan sebesar Rp 14.755.000,-, kredit diragukan mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.430.400,- dan kredit macet mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp. 641.569.400,-. Pada tahun 2013 ke tahun 2014 berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa pada kredit lancar mengalami penurunan kualitas yang sangat signifikan dengan nilai penurunan kredit sebanyak Rp 737.452.000,-, kredit dengan perhatian khusus mengalami penurunan kualitas sebesar Rp. 41.992.100,-, kredit kurang lancar mengalami penurunan sebesar Rp. 16.440.000,-, kredit macet mengalami kenaikan yang cukup signifikan pula yaitu sebesar Rp 280.556.900,-. Dengan kondisi penurunan kualitas lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan kredit macet yang cukup signifikan dapat diartikan bahwa selama periode perguliran/penyaluran dana pada tahun 2012 – 2014 mengalami kondisi yang buruk.

Pada analisis jumlah kredit macet didapatkan hasil bahwa kualitas kredit pada tingkat kurang lancar, diragukan, dan macet memiliki nilai yang cukup tinggi pada tahun penelitian yaitu 2012, 2013 dan 2014. Tiga tingkat kolektibilitas yang kurang tersebut dapat digolongkan pada *Non Performing Loan* atau NPL. NPL merupakan atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi kegiatan kredit. Menurut Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%.

Rasio NPL pada tahun 2012 jumlah kredit bermasalahnya adalah 19%, pada tahun 2013 jumlah kredit bermasalahnya adalah 54% dan tahun 2014 jumlah kredit bermasalahnya menjadi 87%. Dengan nilai rasio yang sangat tinggi ini dapat diartikan bahwa program Perguliran Dana Kelompok SPP Kecamatan Binangun sudah tidak sehat. Hal ini karena banyaknya angka kredit

bermasalah dan dana tidak bergulir secara normal.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan penyebab utama terjadinya kredit bermasalah pada Kelompok SPP Kecamatan Binangun adalah kurangnya tanggungjawab dari peminjam dan tidak adanya upaya kerjasama kelompok peminjam serta tidak adanya jaminan di Kelompok SPP ini. Sehingga pemanfaat dana tersebut meremehkan. Sebagai contoh keadaan nyata yang ada dilapangan adalah jika sipeminjam tidak dapat mengembalikan atau belum mampu mengembalikan maka sipeminjam lebih memilih untuk menghindar daripada menanggung resiko dan pemberian sanksi.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kredit macet di Kecamatan Binangun ada lima. Upaya tersebut antara lain, yaitu dengan penjadwalan ulang jangka waktu pinjaman dan/atau jangka waktu angsuran (*Rescheduling*) yang lebih meringankan kelompok peminjam. Upaya kedua yaitu dengan penataan kembali (*Restructuring*) lembaga yang terkait dalam program perguliran dana kelompok SPP di Kecamatan Binangun ini agar program ini mendapatkan angin segar sehingga dapat mengatasi dan mencegah adanya permasalahan serupa di masa yang akan datang. Upaya yang ketiga yaitu dengan mengkondisikan (*Reconditioning*) kembali dana yang masih ada seperti kondisi awal untuk memulai kembali program perguliran dana dengan sistem yang baru. Upaya yang keempat yaitu Kompensasi harta/Penyitaan jaminan, besaran kompensasi paling tidak harus sesuai dengan jumlah dana yang telah disalahgunakan. Upaya yang terakhir yaitu upaya yang ditujukan kepada pihak-pihak yang menyebabkan kredit bermasalah. Upaya ini lebih mengarah pada penerapan sanksi-sanksi kepada pihak tersebut, seperti sanksi hukum dan juga sanksi moral.

Solusi dari permasalahan yang ada di Kecamatan Binangun yaitu seluruh karyawan UPK Kecamatan Binangun harus lebih intensif memperhatikan perguliran dana agar dapat mencegah kenaikan kredit macet yang ada di

Kecamatan Binangun. Yaitu dengan cara memilih calon kelompok SPP yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh UPK Kecamatan Binangun, penilaian harus dilakukan secara objektif, dilarang memberikan pinjaman kepada kelompok jika pertimbangan lebih kepada belas kasihan, kenalan (bersaudara/teman). Pengawasan langsung yang dilakukan pendamping kelompok dan crew UPK Kecamatan Binangun dengan mengecek ke lapangan, kelompok hendaknya dilakukan secara rutin minimal 5 bulan sekali. Hal tersebut untuk memantau kelompok dan mengetahui penggunaan dana yang diberikan PNPM MP telah digunakan semestinya. Pemantauan dini harus benar-benar dijalankan oleh Tim penyehatan pinjaman, misalnya pada kelompok yang mengalami penundaan pembayaran (lewat dari tanggal jatuh tempo), kondisi usaha kelompok usaha yang dipantau melalui kunjungan langsung untuk mengetahui tanggungan kelompok apakah bertambah atau sebaliknya, supaya pihak lembaga UPK Kecamatan Binangun mengetahui penyalahgunaan dana yang diberikan. Sehingga kelompok yang mengalami masalah bisa diberi pembinaan dalam menyelesaiannya dan menyelamatkan kredit bisa segera dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada pembahasan yang telah diuraikan pada bab hasil dan pembahasan peneliti dapat mendapat hasil dan juga kesimpulan dari rumusan permasalahan yang penelitian uraikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan yang penelitian dapatkan sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Prosedur dalam kegiatan Perguliran Dana Kelompok SPP di Kecamatan Binangun sudah sesuai dengan petunjuk pada buku operasional PNPM Mandiri Perdesaan dalam Program Perguliran Dana. Prosedur yang dijalankan oleh UPK Kecamatan Binangun telah berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan dilapangan tahapan dan langkah-langkah program dilakukan secara baik dan tepat. Terdapat tiga tahapan

utama dalam prosedur program ini yaitu tahapan pengajuan proposal, dimana pada tahapan ini kelompok yang akan mengajukan pinjaman memberikan syarat-syarat yang ditentukan. Tahapan kedua adalah tahapan pemeriksaan atau verifikasi berkas, dimana pada tahap ini Tim Verifikasi memeriksa kebenaran data yang diajukan kelompok untuk kemudian berkas ini disetujui layak tidaknya untuk mendapatkan pinjaman dana. Tahapan ketiga adalah tahap pencairan dana, dimana pada tahap ini kelompok yang telah disetujui untuk mendapatkan dana menerima pinjaman dana bergulir sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.

2. Pada program Perguliran Dana Kelompok SPP Kecamatan Binangun sampai pada Desember 2014 mengalami banyak kredit bermasalah. Dari hasil perhitungan rasio NPL kredit bermasalah pada tahun 2014 adalah sebesar 87%. Rasio ini dapat disimpulkan bahwa program perguliran dana ini sudah tidak sehat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kredit yang bermasalah ada lima. Upaya tersebut antara lain adalah dengan penjadwalan ulang jangka waktu pinjaman dan/atau jangka waktu angsuran (*Rescheduling*) yang lebih meringankan kelompok peminjam. Upaya kedua adalah dengan Penataan kembali (*Restructuring*) lembaga yang terkait dalam program Perguliran Dana Kelompok SPP di Kecamatan Binangun ini agar program ini mendapatkan angin segar sehingga dapat mengatasi dan mencegah adanya permasalahan serupa di masa yang akan datang. Upaya selanjutnya adalah mengkondisikan (*Reconditioning*) kembali dana yang masih ada seperti kondisi awal untuk memulai kembali program Perguliran Dana dengan sistem yang baru. Upaya selanjutnya adalah melakukan Kompensasi harta. Besaran kompensasi paling tidak harus sesuai dengan jumlah dana yang telah disalahgunakan. Upaya selanjutnya adalah upaya yang ditujukan kepada

pihak-pihak yang menyebabkan kredit bermasalah. Upaya ini lebih mengarah pada penerapan sanksi-sanksi kepada pihak tersebut, seperti sanksi hukum dan juga sanksi moral.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran kepada semua pihak PNPM-MP Kecamatan Binangun khususnya Program Perguliran Dana Kelompok SPP, antara lain:

1. Bagi UPK Kecamatan Binangun disarankan, lebih tertib dalam pengadministrasian laporan keuangan bulanan maupun tahunan.
2. Bagi Kelompok SPP Kecamatan Binangun disarankan, untuk lebih sadar dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan dana pinjaman yang sudah diberikan oleh UPK Kecamatan Binangun.
3. Bagi UPK Kecamatan Binangun disarankan, untuk lebih sering mendampingi Kelompok SPP dalam kegiatan di lapangan secara intens.
4. Bagi UPK Kecamatan Binangun disarankan, untuk lebih tanggap dan peka terhadap kondisi Kelompok SPP yang didampingi saat terjadi penunggakan angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade dan Edia Handiman,** 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Penerbit PT Indeks Kelompok Gramedia
- Ashuri, Muhammad,** 2013, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh*.
- Buku Departemen Dalam Negeri RI** tentang *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan Dana Bergulir*.
- Ismail,** 2010, *Manajemen Perbankan*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group.
- Latumaerissa, Julius R.** 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Penerbit Salemba Empat Jakarta.

- Kasmir**, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir**, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada.
- Nuke Prasetyani Nurhayati**, 2007, *Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah*, Jurusan Akuntansi Fakultas Akuntansi Universitas Negeri Semarang.
- Pramaswati, Dwi**, 2013, *Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengatasi Kredit Macet Perusahaan*.
- Pratiwi, Normalia**, 2013, *Analisis Manajemen Kredit Pemilikan Rumah Terhadap Penurunan Kredit Bermasalah*.
- Purwanti, Eka**, 2013, *Evaluasi Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK)*.
- Siamat, Dahlan**, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kelima, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Simorangkir**, 2004, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*, Ghilia Indonesia.
- Sugiyono**, 2013, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta Bandung.